



## Tumpukan Sampah di Depo Sentuh 1.060 Ton

**YOGYA. TRIBUN** - Kondisi darurat sampah di Kota Yogyakarta kembali menjadi sorotan, seiring tumpukan limbah di depo yang belakangan semakin tak terbendung. Sampai kemarin, volume sampah yang tertahan dan menumpuk di sejumlah tempat penampungan sementara di wilayah Kota Pelajar dilaporkan telah melampaui 1.000 ton.

Kepala Bidang (Kabid) Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Ahmad Haryoko pun membenarkan kondisi tersebut. "Sampah yang tertahan di depo-depo per hari ini ada sekitar 1.060 ton," ungkapnya, saat dikonfirmasi, Kamis (20/11).

Menurut Haryoko, selain upaya pengolahan yang terkendala cuaca, pihaknya menghadapi problem minimnya kuota pembuangan menuju TPA Piyungan. Hal tersebut, praktis berdampak langsung

pada upaya pengosongan depo yang berjalan lambat di tengah operasionalnya yang terus berjalan. "Kita hanya diberi kuota 200 ton. Jadi, tidak bisa maksimal. Belum semua (sampah) dapat terangkut," terangnya.

Dengan tumpukan yang sudah mencapai lebih dari 1.000 ton, DLH Kota Yogyakarta harus berpacu dengan waktu, mengingat libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) semakin dekat

Haryoko menyebut, sisa tumpukan yang belum bisa terboyong itu akan diupayakan untuk sesegera mungkin diangkut secara bertahap menuju TPA Piyungan. "Secara bertahap tetap akan (diangkut) ke TPA Piyungan. Ditupayakan sebelum libur Nataru (depo kembali normal)," cetusnya.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY,

Kusno Wibowo, menjelaskan, bahwa penumpukan di depo secara teknis merupakan ranah pemerintah kabupaten/kota. "Kalau terkait depo, itu kewenangannya ada di Kabupaten/Kota, dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta. Provinsi itu kewenangannya di TPA Regional. Jadi manajemen pengangkutan dari sumber ke depo, itu ranahnya teman-teman kota," ujarnya.

Kendati demikian, Kusno tidak menampik, pembatasan di TPA Piyungan memang masih berlaku bagi Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta (Kartamantul). Sehingga, dia berharap pemerintah kabupaten/kota dapat mengoptimalkan pengolahan sampah secara desentralisasi sebelum dikirim ke TPA.

"Kordinasi selalu ada. Memang saat ini di TPA Piyungan kita sedang penataan, jadi ada pembatasan volume atau

kuota (pembuangan)," katanya. "Maka, kami minta daerah untuk mengoptimalkan pengolahan desentralisasi dulu, residunya baru ke Piyungan sesuai kuota," pungkás Kusno.

### **Ironi**

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Munazar, mengungkapkan bahwa kondisi itu menunjukkan "cermin retak" dari sistem yang belum beres. "Yogyakarta selalu menjadi magnet wisata. Tapi, di sisi lain menyimpan persoalan yang kian menganga. Jika kita melihat data jelang akhir 2025, volume sampah justru melonjak drastis. Ini ironi, karena seharusnya kota ini bersolek, tapi kondisinya malah kian parah," ujarnya, Kamis (21/11).

Berdasarkan catatan DLHK DIY, Pemkot Yogyakarta masih diperbolehkan membuang 300 ton sampah per minggu

ke TPA Piyungan. Padahal, tempat pembuangan akhir yang sudah beroperasi sejak 1994 itu diprediksi menemui senjalnya, alias tutup total pada awal 2026. "Tanpa solusi jangka panjang, kita hanya memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain. Pemerintah daerah perlu berhenti menganggap krisis sampah sebagai persoalan musiman yang cukup diselesaikan dengan kebijakan tambal sulam," tegasnya.

Sebagai bagian dari solusi, DPRD Kota Yogyakarta mendorong perubahan strategi yang benar-benar konkret, dari sentralistik menjadi desentralisasi. Munazar menilai, ketergantungan pada TPA Piyungan harus dipangkas dengan memperkuat pengolahan sampah di tingkat hulu (RT, RW, atau Kelurahan), mencontoh model TPS3R yang sukses di kota lain. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005